



PEMBERDAYAAN DESA

Disampaikan oleh :
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali

Ir. Ketut Lihadnyana, M.MA

Training of Trainer (ToT) Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN-PPM LPPM UNUD



DASAR HUKUM

1

**UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

2

**UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA**

URUSAN PEMERINTAHAN



URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG DISELENGGARAKAN DAERAH

Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

6 URUSAN:

- Pendidikan;
- Kesehatan;
- pekerjaan umum dan penataan ruang;
- perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat; dan
- sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

18 URUSAN

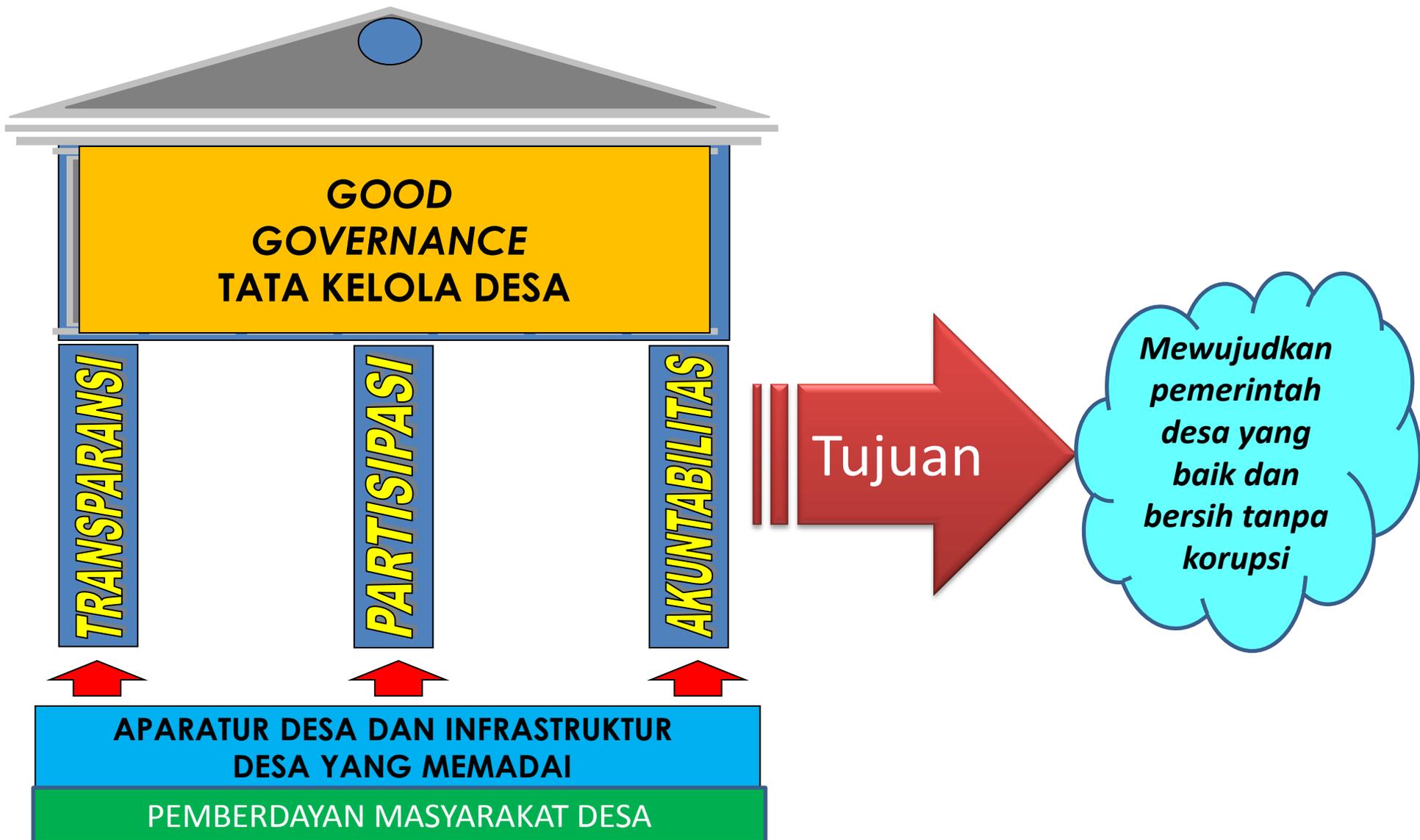
- tenaga kerja;
- pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- Pangan;
- Pertanahan;
- lingkungan hidup;
- administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- perhubungan;
- komunikasi & informatika;
- koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- penanaman modal;
- kepemudaan dan olah raga;
- Statistik;
- Persandian;
- kebudayaan;
- perpustakaan; dan
- kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan

8 URUSAN:

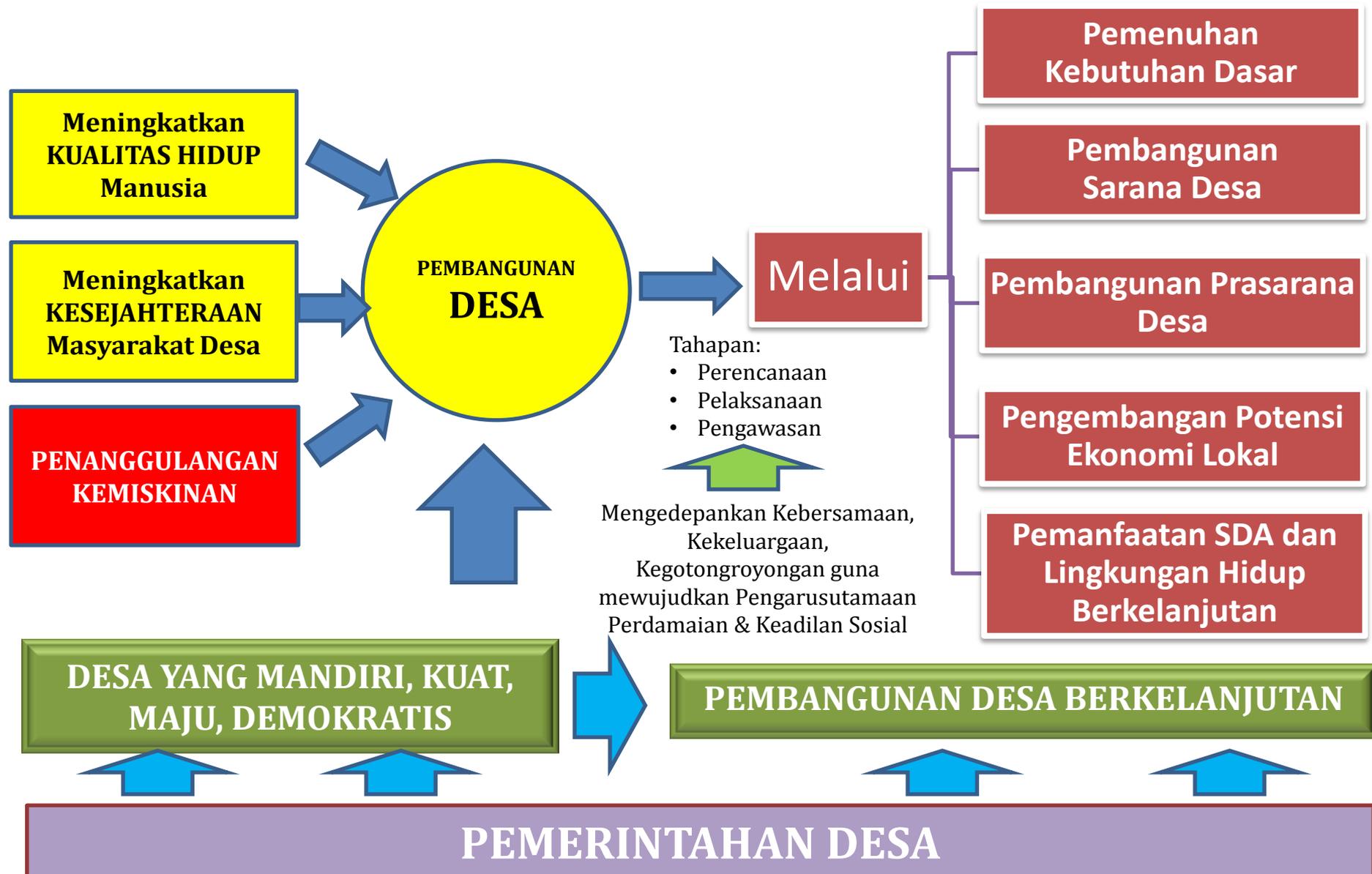
- kelautan dan perikanan;
- Pariwisata;
- Pertanian;
- kehutanan;
- energi dan sumber daya mineral;
- perdagangan;
- perindustrian; dan
- transmigrasi.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA

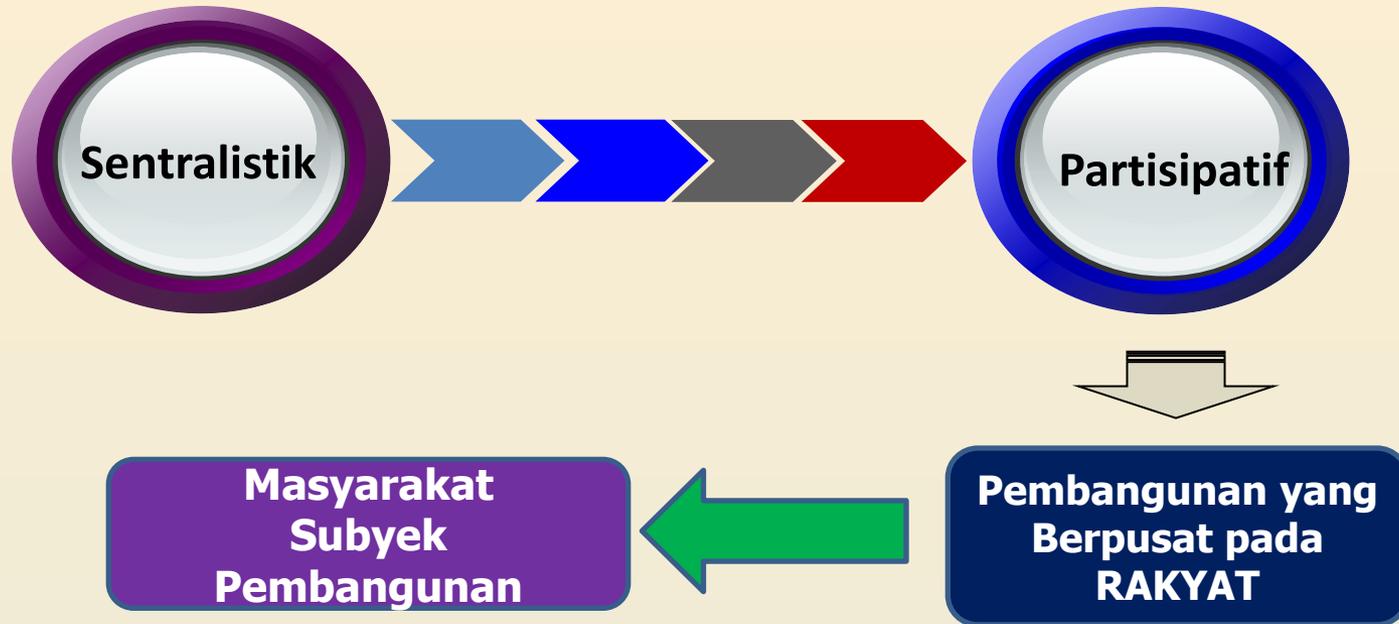




PEMBANGUNAN DESA



Pergeseran Paradigma Pembangunan Desa



From Government  *to Governance*

- Memberikan hak eksklusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik;
- Aktor diluarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.
- Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama

UU Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 112:

Ayat (3):

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan:

- a. Menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;
- b. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, dan
- c. Mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.

Ayat (4):

Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan **PENDAMPINGAN** dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.

Penjelasan Pasal 90 (b) :

Yang dimaksud dengan “pendampingan” adalah termasuk penyediaan sumber daya manusia pendamping dan manajemen.

Konsep Pemberdayaan Masyarakat

- **Pemberdayaan Masyarakat lahir karena adanya KEGAGALAN dan HARAPAN:**
 - **KEGAGALAN**: gagalnya model pembangunan ekonomi masa lampau dalam rangka menanggulangi kemiskinan
 - **HARAPAN**: adanya alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender dan pertumbuhan ekonomi yang memadai;
- **Pemberdayaan merupakan konsep pembangunan yang merangkum nilai-nilai sosial, dan karena itu sangat bersentuhan dengan aspek pembangunan kesadaran rasional;**
- **Konsep pemberdayaan mencerminkan paradigma pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory, empowering, delegation of authority and Trust, sustainable* (Chambers, 1995);**

Komponen Pokok Pemberdayaan Masyarakat Desa





Strategi Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa



JIKA TIDAK SEGERA DITANGGULANGI

Dampak Kemiskinan :

1 Meningkatkan Jumlah Pengangguran



Ketrampilan kerja yang rendah mengakibatkan masyarakat miskin sulit mengakses pekerjaan formal

2 Tingginya Angka Kriminalitas



Akibat tekanan kemiskinan, seseorang bisa berpotensi melanggar hukum untuk memenuhi kebutuhan hidupnya

3 Bertambahnya Jumlah Usia Putus Sekolah



Anak terpaksa berhenti sekolah untuk ikut bekerja membantu ekonomi keluarga

4 Munculnya Fenomena Pekerja Anak



Anak dalam keluarga miskin cenderung dilihat sebagai obyek penghasil uang secara instan

5 Akses Kesehatan Sulit Terjangkau



Biaya berobat yang tinggi membuat keluarga miskin semakin sulit mengakses fasilitas kesehatan

6 Terancamnya Perkembangan Generasi Penerus



Lemahnya pengawasan sosial mengakibatkan remaja rentan terhadap potensi penggunaan NAPZA

BUTUH KERJA





Strategi Entaskan Kemiskinan



4

strategi dasar percepatan penanggulangan kemiskinan



1 Optimalisasi program perlindungan sosial



2 Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar



3 Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin



4 Menciptakan pembangunan yang inklusif

kurangi beban & tambah pendapatan

Pelaksanaan 4 strategi percepatan penanggulangan kemiskinan diterapkan dalam 3 klaster:

klaster I Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga

klaster II Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat

klaster III Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

1. Penyempurnaan data penerima manfaat
2. Menemukenali permasalahan sosial (diagnosa kemiskinan)

Strategi dasar percepatan penanggulangan kemiskinan



C
L
U
S
T
E
R

klaster II Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin



MELALUI MISI

Mewujudkan Bali yang Sejahtera dan Sukerta Lahir Batin.



"Terwujudnya Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera"

SASARAN STRATEGIS PROGRAM & KEGIATAN DISPMD PROVINSI BALI

Terwujudnya
TKPKDesa



Meningkatnya
investasi padat
pekerja/padat
karya



Meningkatnya akses usaha
mikro dan kecil untuk
mengembangkan modal
usaha, keterampilan dan
pengembangan teknologi

Meningkatnya
kemitraan/kerjasama
desa dengan pihak
ketiga



Tersedianya sarana
dan prasarana
pendukung kegiatan
ekonomi yang
berkualitas

Meningkatnya
penjangkauan
pelayanan sosial
dasar



Meningkatnya
produktifitas
usaha masy.
Kurang mampu

TERWUJUDNYA KEADILAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT PERDESAAN

GERBANGSADU

Gerakan Pembangunan
Desa Terpadu



Penataan
BUMDesa,
Penguatan
Kelembagaan
BUMDesa

Sampai
dengan Tahun
2016

217 Desa

Pembinaan,
pendampingan
dalam
pengembangan
usaha dan
kewirausahaan
masy. desa

Penanggulangan
kemiskinan dan
pengembangan
usaha
ekonomi
masyarakat
Desa

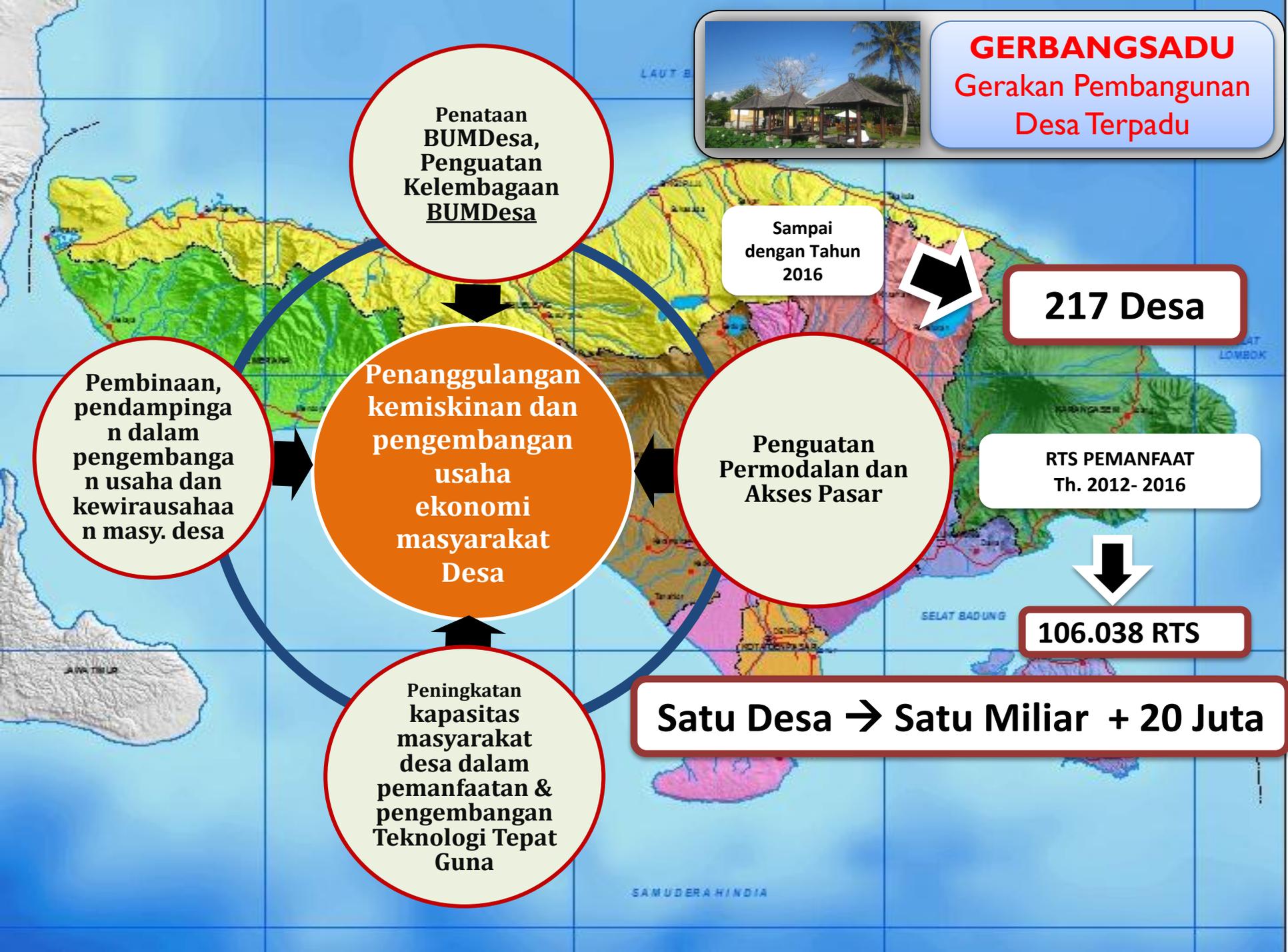
Penguatan
Permodalan dan
Akses Pasar

RTS PEMANFAAT
Th. 2012- 2016

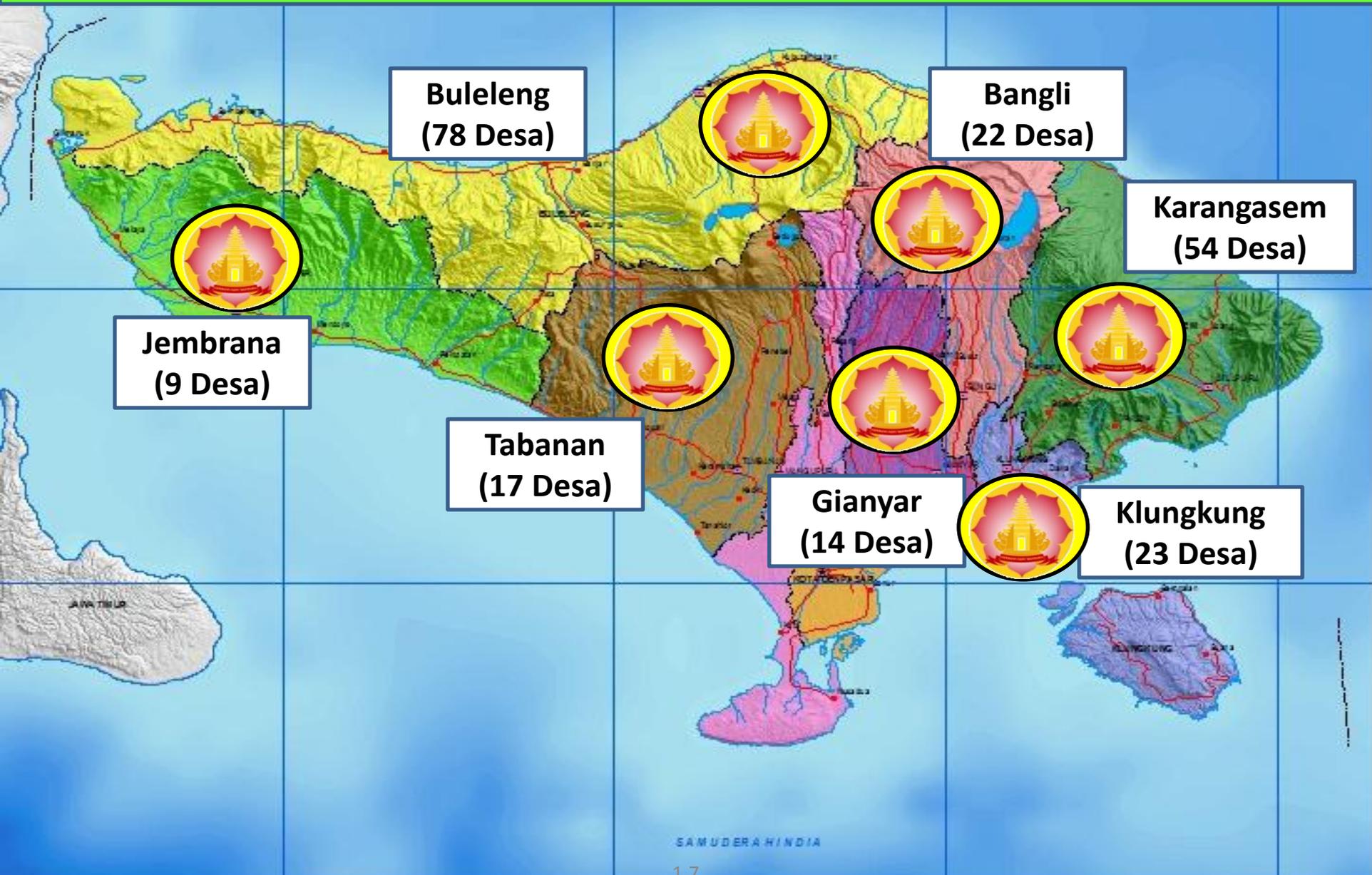
106.038 RTS

Peningkatan
kapasitas
masyarakat
desa dalam
pemanfaatan &
pengembangan
Teknologi Tepat
Guna

Satu Desa → Satu Miliar + 20 Juta



PETA LOKASI PROGRAM GERBANGSADU MANDARA



SEBARAN BUM DESA DI PROVINSI BALI S.D. TAHUN 2017

NO.	KABUPATEN	BUM DESA DIBENTUK MELALUI GSM	BUM DESA DIBENTUK DILUAR GSM	JMLH BUMDesa
1.	JEMBRANA	9	31	40
2.	TABANAN	17	55	72
3.	BADUNG	-	13	13
4.	GIANYAR	14	-	14
5.	KLUNGKUNG	23	5	28
6.	BANGLI	22	7	29
7.	KARANGASEM	54	9	63
8.	BULELENG	78	7	85
9.	DENPASAR	-	6	6
JUMLAH		217	133	350



IMPLEMENTASI DANA DESA
PROVINSI BALI



Prinsip-Prinsip Penggunaan Dana Desa 2017



Keadilan



**Kebutuhan
Prioritas**



**Tipologi
Desa**

Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017



**Pembangunan
Desa**

**Untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat
Desa dan kualitas hidup
manusia serta
penanggulangan kemiskinan**

**Pemberdayaan
Masyarakat
Desa**

**Untuk meningkatkan
kapasitas warga atau
masyarakat desa dalam
pengembangan wirausaha,
peningkatan pendapatan,
serta perluasan skala
ekonomi individu warga
atau kelompok masyarakat
dan desa**

DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015-2017

MENURUT KAB./KOTA SE-BALI

NO	KAB./KOTA	JML. DESA	TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017	
			JUMLAH (000)	RATA2 PER DESA (000)	JUMLAH (000)	RATA2 PER DESA (000)	JUMLAH (000)	RATA2 PER DESA (000)
1	Jembrana	41	12.410.047	302.684	27.863.479	679.597	36.475.565	889.648
2	Tabanan	133	37.068.940	278.713	83.183.813	625.442	106.417.874	800.134
3	Badung	46	13.826.342	300.572	31.046.783	674.930	40.315.619	876.426
4	Gianyar	64	19.166.561	299.477	43.035.691	672.432	55.753.828	871.153
5	Klungkung	53	15.260.569	287.935	34.259.137	646.398	44.540.097	840.379
6	Bangli	68	19.197.775	282.320	43.090.305	633.680	55.783.753	820.349
7	Karangasem	75	21.962.811	292.837	49.301.984	657.359	63.682.742	849.103
8	Buleleng	129	36.812.689	285.369	82.620.493	640.468	105.860.971	820.628
9	Denpasar	27	9.723.248	360.120	21.863.005	809.740	28.428.056	1.052.891
JUMLAH		636	185.428.983	298.891	416.264.690	671.116	537.258.505	868.967

PERAN SDM DALAM PELAKSANAAN DANA DESA

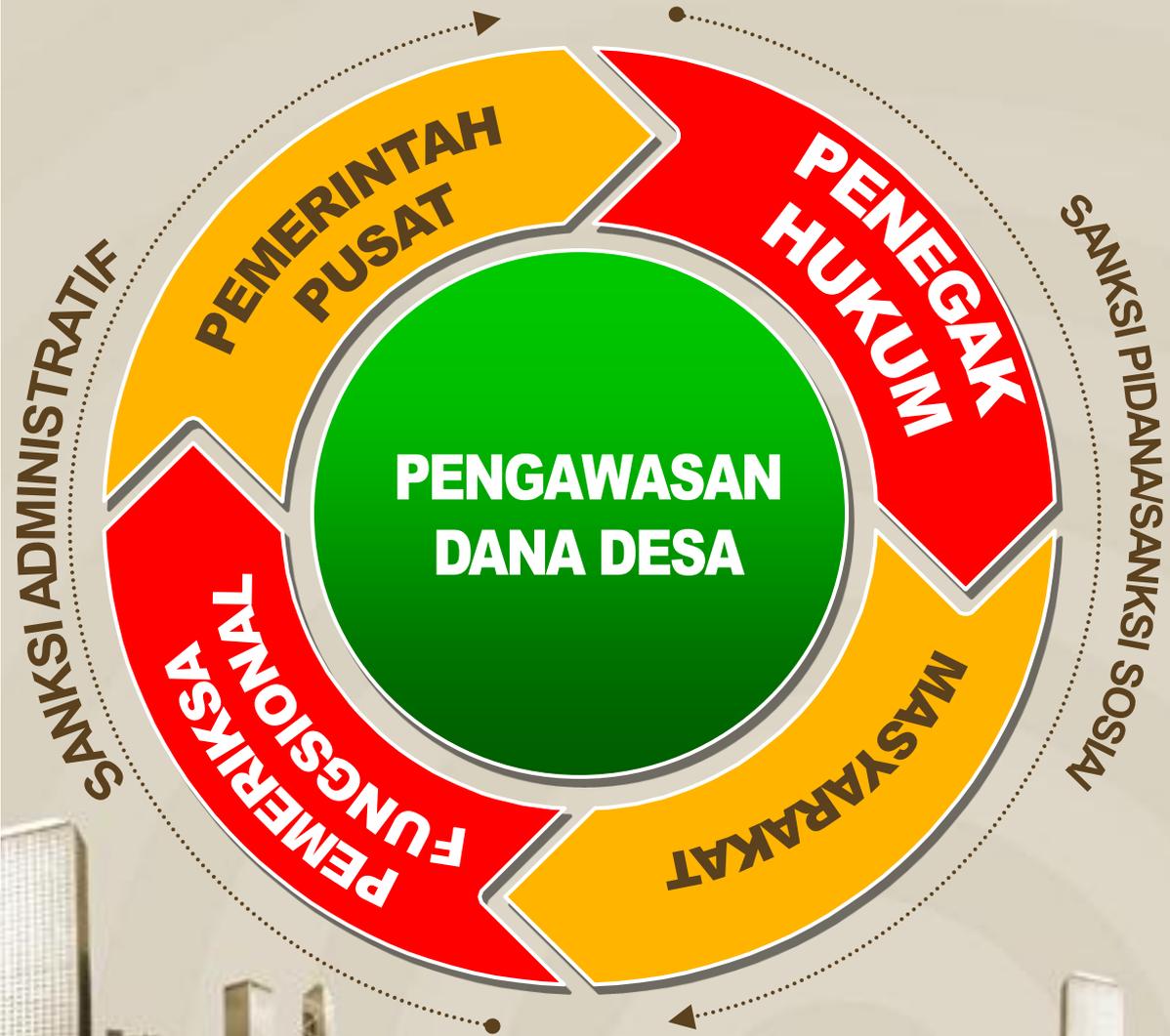


- Pengelolaan keuangan desa mengikuti pola pengelolaan Keuangan daerah
- Kepala Desa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa
- Kepala desa/perangkat desa perlu memiliki kapasitas dalam pengelolaan keuangan desa

- pemerintah (pusat/prov/kab/kota) melakukan upaya pemberdayaan masyarakat.
- Pendampingan dilakukan oleh tenaga professional, pendamping teknis dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa atau pihak ketiga (LSM, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan atau perusahaan)

Monitoring Dana Desa

- Akuntabilitas penggunaan Dana Desa tergantung pada Pemerintahan Desa dan merupakan subjek audit BPK
- Pengawasan dilakukan disetiap level pemerintahan sesuai dengan kewenangan. Masyarakat dapat juga melakukan pengawasan jika terjadi penyalahgunaan atas Dana Desa dapat dilaporkan pada aparat penegak hukum.
- Monitoring dan pengawasan penggunaan dana Desa utamanya dilaksanakan oleh Pemda.



Hambatan Penyaluran Dana Desa



Perbedaan pandangan antara Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)/DPPADK dengan PMD serta bagian Pemerintah Desa di Sekretariat Daerah/Kabupaten mengenai:

Keberadaan dokumen RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa

Posting belanja yang tidak tepat di APBDesa

Tidak lengkapnya dokumen RKP Desa (tidak ada RAB-Desain)

Harga satuan atau SBU desa dan kabupaten berbeda

Evaluasi Penggunaan Dana Desa 2016

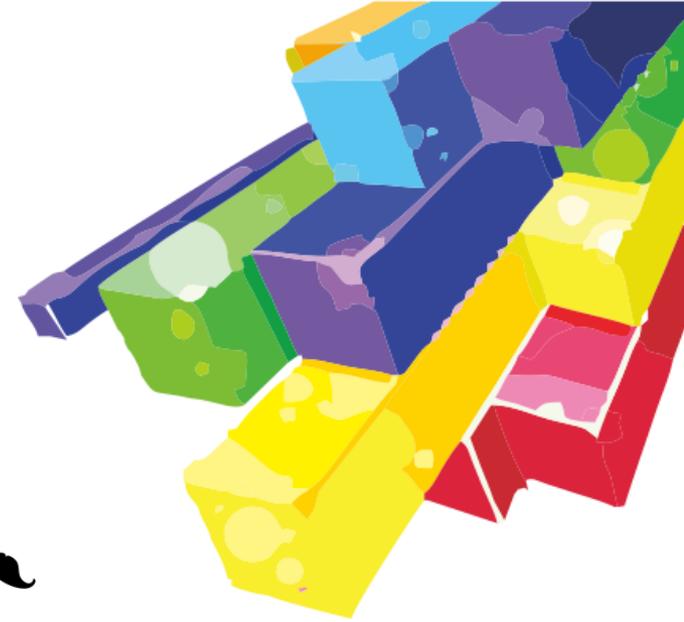


Inovasi dan Kreativitas Pemerintahan Desa dalam menggali sumber daya lokal/potensi desa relatif masih kurang optimal.

Dana Desa belum digunakan secara optimal untuk menggali sumber pendapatan baru melalui investasi produktif yang dijalankan oleh masyarakat Desa.

Dana Desa terkesan menimbulkan ketergantungan baru karena belum digunakan untuk kegiatan yang dapat menopang perekonomian masyarakat setempat serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

Proporsi alokasi dana untuk pembangunan fisik dan non fisik masih belum seimbang



CAPAIAN PEMERINTAH PROVINSI BALI



PERTUMBUHAN EKONOMI TW IV TAHUN 2016 BALI DAN NASIONAL

IPM

INDEKS
PEMBANGUNAN
MANUSIA



6,26%

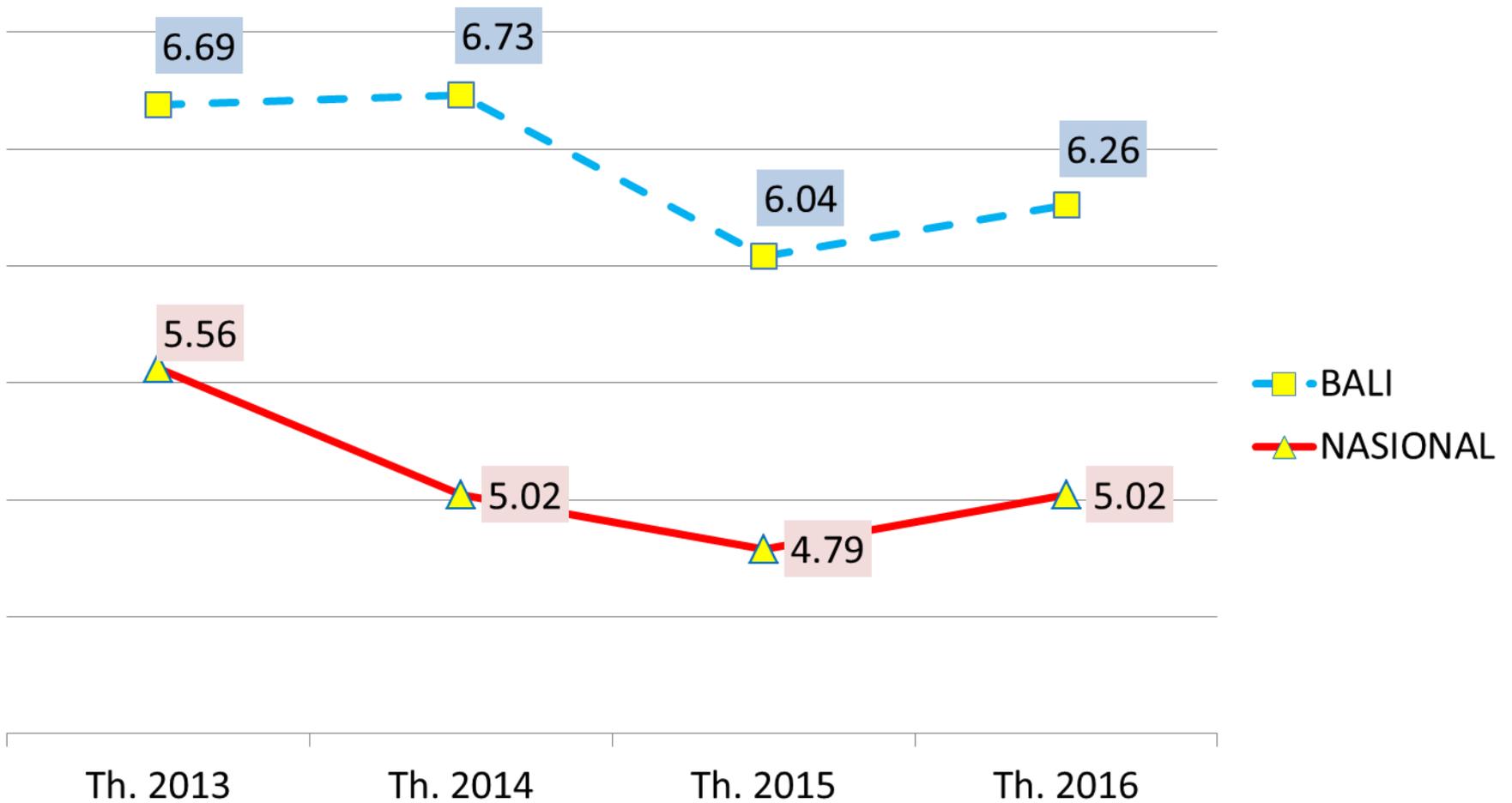
BALI

5,02 %

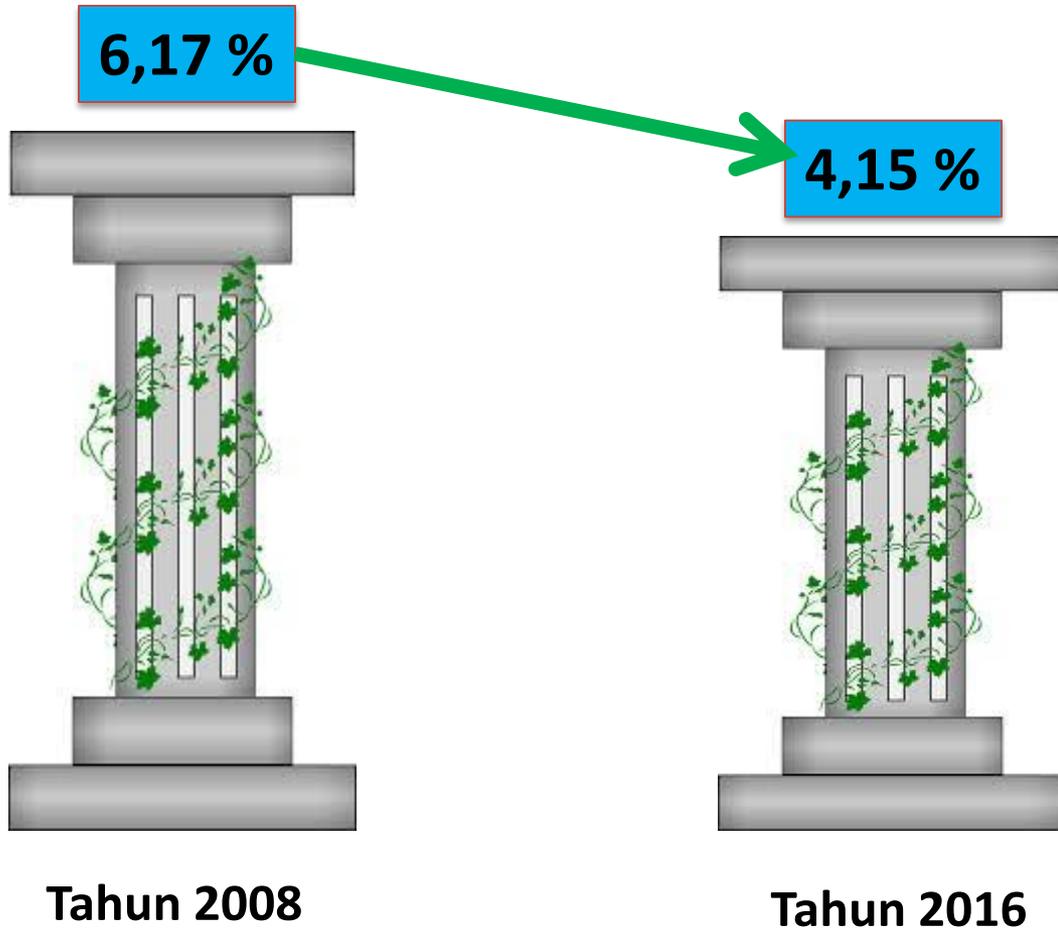
NASIONAL



PERTUMBUHAN EKONOMI BALI DAN NASIONAL TAHUN 2013-2016



ANGKA KEMISKINAN PROVINSI BALI TAHUN 2008 - 2016

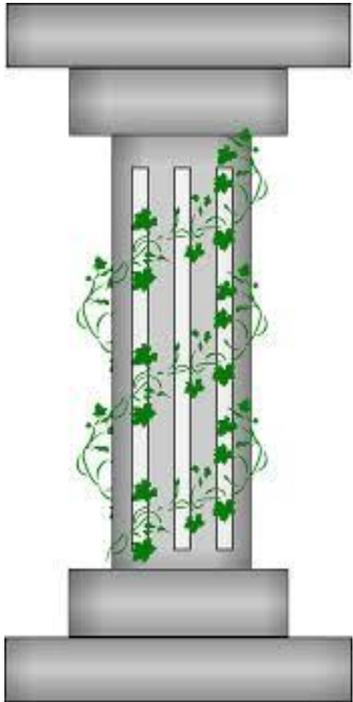


JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI PERDESAAN LEBIH KECIL DARIPADA DI PERKOTAAN



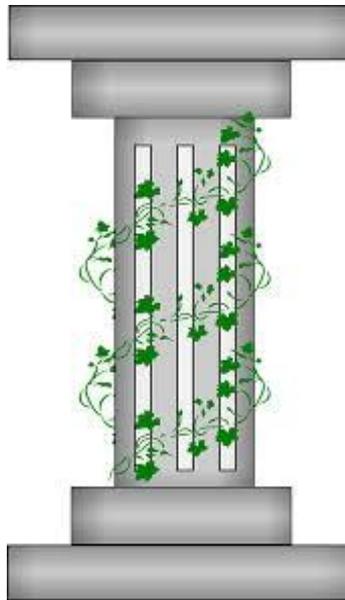
TINGKAT PENGANGGURAN PROVINSI BALI TAHUN 2008 - 2017

3,31 %



Tahun 2008

1,28 %



Tahun 2017



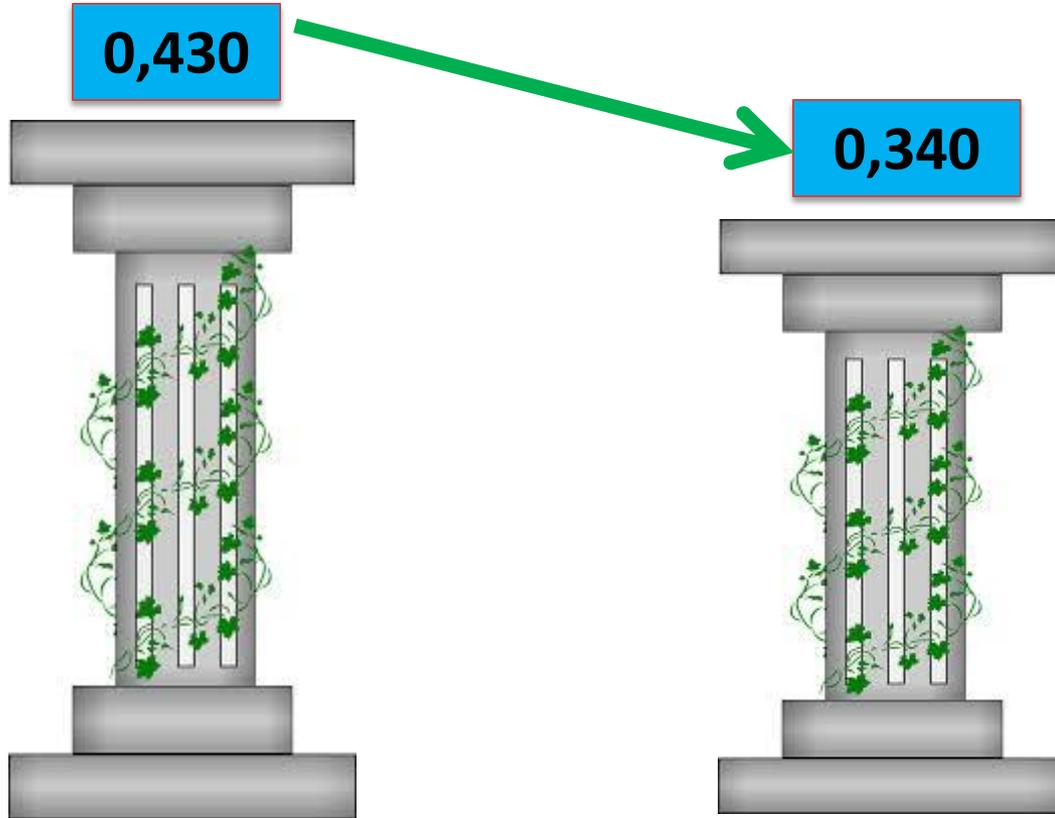
Pada Bulan Agustus 2017 Posisi Tingkat Pengangguran Bali
No. 1 Terendah di Indonesia

Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan

Pebruari 2016 – Pebruari 2017

Pendidikan	Pebruari 2016	Agustus 2016	Pebruari 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
SD Ke Bawah	1,64	0,30	0,43
Sekolah Menengah Pertama	2,15	0,65	2,47
Sekolah Menengah Atas	2,65	2,17	1,28
Sekolah Menengah Kejuruan	3,01	3,96	1,06
Diploma I/II/III	2,06	4,44	1,34
Universitas	1,81	4,35	2,78
Jumlah	2,12	1,89	1,28

INDEKS GINI RATIO BALI TAHUN 2012-2015



Tahun 2012

Tahun 2016

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| ➤ $GR \leq 0,20$ | ➔ Ketimpangan Sangat Rendah |
| ➤ $0,20 < GR \leq 0,39$ | ➔ Ketimpangan Rendah. |
| ➤ $0,39 < GR \leq 0,59$ | ➔ Ketimpangan Sedang. |
| ➤ $0,59 < GR \leq 0,79$ | ➔ Ketimpangan Tinggi. |
| ➤ $GR > 0,79$ | ➔ Ketimpangan Sangat Tinggi |





Matur Suksma

Om Santhi, Santhi, Santhi Om